

**Peran Pemuda Dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Implikasinya
Terhadap Ketahanan Wilayah
(Studi Di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Mifdal Zusron Alfaqi

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang

Email: mifdal.zusron.fis@um.ac.id

Muhammad Mujtaba Habibi

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang

Email: m.muftaba.fis@um.ac.id

Desinta Dwi Rapita

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang

Email: desinta.fis@um.ac.id

ABSTRACT

This research discussed about the role of youth in preventing corruption and its implications to the regional resilience. The research was conducted at Young Anti-Corruption Task Force Yogyakarta, Institution Hikmah and Public Policy, Regional Leadership of Muhammadiyah Yogyakarta. The aims of this research were: (1) knowing the role of youth in efforts to prevented corruption, (2) knowing the implications of youth's role against regional resilience in the City of Yogyakarta.

This research used qualitative approach, the subject of research was Satgas Muda Anti Korupsi and the object of research was the role of youth in preventing corruption and its implications to the regional resilience.

The results showed that the Young Anti-Corruption Task Force had of role in preventing corruption in the City of Yogyakarta. The role performed by three activities, namely (1) the anti-corruption education, (2) dissemination of anti-corruption, (3) supervision to government. However, this role was not easily done because there were several obstacles encountered, there were: (1) energy members still could not be optimal, (2) the lack of understanding problem of corruption by members. Efforts had been made to overcome the obstacles in increasing the energy of members and improved the understanding of corruption through activities and training. The role of youth in corruption prevention efforts had implications for the regional resilience in the City of Yogyakarta with criteria including aspects of ideology, politic, economy, social and cultural, and security.

Keywords: Role of Youth, Prevention of Corruption, Regional Resilience

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang peran pemuda dalam upaya pencegahan korupsi dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah. Penelitian ini dilakukan pada Satgas Muda Anti Korupsi Kota Yogyakarta, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah (1), mengetahui peran pemuda dalam upaya pencegahan korupsi, (2), mengetahui implikasi peran pemuda terhadap ketahanan wilayah Kota Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana subyek penelitian adalah Satgas Muda Anti Korupsi dan obyek penelitian adalah peran pemuda dalam upaya pencegahan korupsi dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satgas Muda Anti Korupsi berperan dalam upaya pencegahan korupsi di Kota Yogyakarta. Peran tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu (1) pendidikan anti korupsi, (2) sosialisasi anti korupsi, (3), pengawasan kepada pemerintah. Kendati demikian, dalam melakukan peran terdapat kendala yang dihadapi yaitu (1), energi anggota masih belum bisa optimal, (2) kurangnya pemahaman permasalahan korupsi oleh anggota. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dengan meningkatkan energi anggota serta meningkatkan pemahaman korupsi melalui kegiatan dan pelatihan. Peran pemuda dalam upaya pencegahan korupsi ini berimplikasi terhadap ketahanan wilayah Kota Yogyakarta dengan kriteria yang meliputi aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek keamanan.

Keywords: *Peran Pemuda, Pencegahan Korupsi, Ketahanan Wilayah*

PENGANTAR

Permasalahan korupsi yang dialami oleh bangsa Indonesia telah berada pada titik yang mengkhawatirkan. Hal ini dikarenakan dampak yang diakibatkan dari adanya korupsi sangat luas dan mengganggu keberlangsungan proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala proses pembangunan dalam sistem asta gatra sangat terganggu mulai pembangunan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pembangunan pertahanan dan keamanan dalam gatra sosial. Kondisi tersebut membuktikan bahwa permasalahan korupsi harus dicarikan jalan keluar yang terbaru, supaya permasalahan korupsi yang sudah sangat terstruktur sistematis dan sangat masif ini memiliki jalan keluar yang terbaik.

Perubahan rezim Orde Baru menuju Era reformasi 1998 memunculkan kebijakan Otonomi Daerah. Tujuan awal dari Otonomi Daerah adalah untuk menghilangkan pemerintahan yang otoriter karena adanya sistem pemerintahan yang sentralistik. Akan tetapi dalam perjalanannya Otonomi Daerah justru membuat bangsa ini semakin rumit dalam mengatasi permasalahan korupsi. Munculnya Otonomi Daerah membuat korupsi semakin merajalela di setiap wilayah yang ada di Indonesia. Kasus korupsi yang terjadi saat ini banyak yang melibatkan beberapa pemimpin daerah mulai dari gubernur sampai bupati/walikota yang tersangkut masalah

korupsi menjadikan permasalahan baru bagi bangsa ini. Data litbang Kompas menunjukkan bahwa pada 2004-2015 ada 17 gubernur dan 49 bupati dan walikota yang tersangkut masalah korupsi, kemudian pada tahun 2016 tercatat ada 8 kepala daerah yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2014). Hal tersebut menjadi bukti bahwa adanya Otonomi Daerah ternyata tidak sepenuhnya menjadi positif dalam proses pemberantasan korupsi. Pendapat tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Thoha (2012) bahwa masuknya Otonomi Daerah membuat peluang munculnya “raja-raja kecil” di daerah, pemimpin atau pejabat politik dari birokrasi yang ada di daerah. Selain itu korupsi tidak lagi hanya dilakukan oleh para pejabat pemerintahan saja, korupsi saat ini sudah masuk di dalam sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Hadi (2010) menafsirkan secara umum korupsi telah masuk ke setiap sendi kehidupan masyarakat Indonesia, masalah ini terjadi karena korupsi yang dulunya hanya terpusat pada pemerintahan pusat, pada era Otonomi Daerah korupsi juga ikut terdesentralisasi ke seluruh wilayah-wilayah yang ada di Indonesia.

Upaya pemberantasan korupsi yang efektif dan komprehensif membutuhkan partisipasi banyak pihak, tidak terkecuali pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Alasan kuat mengapa pemuda perlu dilibatkan karena mengacu

kepada sejarah bangsa Indonesia di mana pemuda selalu menjadi pelopor perubahan dari jaman penjajahan sampai era reformasi, oleh karena itu peran pemuda secara aktif dalam mengatasi permasalahan korupsi melalui tindakan pencegahan sangat diperlukan. Ketika peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemuda telah solid dan kuat, maka harapannya masalah-masalah korupsi dapat diatasi dengan baik.

Satgas Muda Anti Korupsi merupakan salah satu organisasi yang berupa gerakan pencegahan korupsi di Kota Yogyakarta. Organisasi tersebut diisi oleh barisan pemuda yang mempunyai komitmen tinggi terhadap karakter pribadi bangsa Indonesia. Menurut Widiatmaka dkk (2016) peran organisasi pemuda dapat membangun karakter yaitu religius, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kejujuran, amanah, peduli antar sesama, kerja sama, percaya diri, kreatif, pantang menyerah, kepemimpinan, toleransi, dan nasionalisme. Gerakan anti korupsi yang dilakukan oleh Satgas Muda Anti Korupsi bersifat berkelanjutan dan tidak hanya berdasarkan pada adanya kasus korupsi saja. Hal tersebut tentu menjadi menarik untuk diteliti karena kebanyakan organisasi anti korupsi yang lain hanya muncul ketika ada permasalahan korupsi dan setelah itu gerakannya meredup. Apalagi keberadaan Satgas Muda Anti Korupsi di wilayah Kota Yogyakarta, mengingat Kota Yogyakarta selalu menjadi barometer perubahan bangsa ini. Gerakan pendidikan taman siswa yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara atau gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh KH. Ahmad Dahlan yang melahirkan organisasi Muhammadiyah tentu dapat dijadikan contoh di mana Kota Yogyakarta memiliki peran penting dalam perubahan yang ada di negeri ini. Maka dari

itu ketika mengkaji gerakan anti korupsi yang berada di Kota Yogyakarta ini, harapannya dapat dicontoh oleh wilayah-wilayah yang lain di Indonesia. Secara spesifik permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah peran pemuda dalam upaya pencegahan korupsi, implikasi peran pemuda terhadap ketahanan wilayah Kota Yogyakarta.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teori sebagai pisau analisis penelitian, yaitu teori peran, teori pemuda, teori pemberantasan korupsi, dan teori ketahanan wilayah.

Peran menurut Soekanto (2009) merupakan proses yang harus dilalui oleh subyek yang memiliki kedudukan sebagai aktor yang menjalankan peran, sehingga kepentingannya dapat tercapai. Artinya setiap peran yang dilakukan oleh seseorang harus menjadi sebuah tindakan yang harus dilakukan secara baik dan bertanggungjawab.

Pendapat lain mengenai peran disampaikan oleh Horton dan Hunt (1993) dimana peran merupakan sebuah perilaku yang diharapkan di mana orang tersebut memiliki status. Peran masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang biasa disebut dengan struktur sosial masuk dalam model ini. Peran tersebut ditentukan oleh hakikat dari peran yang dilakukan, hubungan antara peran-peran yang dilakukan, serta distribusi sumberdaya yang langka dari setiap orang yang melakukan peran. Suhardono (1994) juga mendefinisikan teori peran, yaitu bentuk fungsi yang dilakukan oleh suatu individu maupun dilakukan oleh kelompok yang pada saat itu menduduki suatu posisi tertentu dalam struktur sosial.

Mendefinisikan tentang pemuda merujuk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 tentang Kepemudaan bahwa pemuda adalah seorang warga negara yang

memasuki periode penting dalam masa pertumbuhan yang digolongkan dalam kelompok umur 16 sampai 30 tahun. Artinya setiap warga negara yang memiliki umur dalam kelompok usia 16 sampai 30 tahun bisa dikatakan sebagai pemuda, pemuda pada usia tersebut bisa dikatakan masuk dalam usia yang sangat diandalkan dalam proses pembangunan bangsa.

Tindakan pencegahan korupsi merujuk pada pendapat Evans (2009), dapat dilakukan dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi, dengan begitu proses pencegahan ini sangat penting untuk dilakukan dalam mengatasi masalah korupsi, Tindakan pencegahan akan mempunyai dampak positif terhadap proses pemberantasan korupsi, seperti yang telah disampaikan oleh Pradiptyo (2009) bahwa pencegahan dan tindakan preventif akan lebih bermanfaat dalam mengatasi permasalahan korupsi daripada dengan melakukan tindakan sanksi hukum yang tinggi. Tindakan pencegahan korupsi ini dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu: (1) Melaksanakan pendidikan anti korupsi. (2) Melaksanakan sosialisasi anti korupsi. (3) Melaksanakan pengawasan kepada pemerintah.

Ketahanan wilayah pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari konsep ketahanan nasional, karena dari ketahanan wilayah tersebut pada akhirnya ketahanan nasional akan terwujud. Seperti yang telah disampaikan oleh Sunardi (2004) bahwa ketahanan wilayah merupakan bentuk mikro dari ketahanan nasional. Kriteria ketahanan wilayah merujuk pada pendapat Savitri (2014) merupakan suatu proses pengelolaan segala prinsip atau aspek yang bertujuan untuk mewujudkan ketangguhan suatu wilayah. Aspek yang dimaksud adalah asta gatra yang terdiri

dari kelompok gatra alamiah yang meliputi geografi, kekayaan alam dan kependudukan, serta kelompok gatra sosial yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif merujuk pada pendapat Wahyuni (2012) adalah sebuah penelitian yang dipergunakan peneliti untuk mendapatkan data dan mengkaji bidang sosial. Penelitian kualitatif juga dapat digunakan untuk penelitian terhadap orang secara pribadi maupun kelompok atau organisasi. Pendapat lain tentang penelitian kualitatif disampaikan oleh Moleong (2006) bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena yang ada pada subyek penelitian mulai dari perilaku, peran, persepsi, dan juga tindakan. Hal tersebut kemudian dianalisis dengan cara deskripsi berbentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks alamiah.

Penelitian ini berlokasi di kantor Satgas Muda Anti Korupsi Kota Yogyakarta. Informan penelitian pada penelitian ini adalah ketua, wakil ketua, pengurus, anggota dan pihak terkait Satgas Muda Anti Korupsi. Metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, catatan lapangan, kepustakaan internet dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.

PEMBAHASAN

Profil Satgas Muda Anti Korupsi Kota Yogyakarta

Satgas Muda Anti Korupsi merupakan gerakan yang dilakukan oleh Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Kota Yogyakarta. Hal ini merupakan wujud dari konsistensi

Muhammadiyah dalam melakukan *jihād* terhadap permasalahan korupsi yang ada di Kota Yogyakarta dan juga di Indonesia. Gerakan ini terbentuk atas inisiasi Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP), Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta. Keanggotaan Satgas Muda Anti Korupsi terdiri dari Angkatan Muda Muhammadiyah PDM Kota Yogyakarta, yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Djasman Al-Kindi, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) AR Fakhruddin, Pemuda Muhammadiyah (PM), Nasyyatul Aisyiyah(NA), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Majelis Pendidikan Kader (MPK), dan juga *Peoneer* Satgas Muda Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Seperti yang telah dikatakan oleh Arif Muhammad Ketua Satgas Muda Anti Korupsi dalam wawancara dengan peneliti, berikut kutipan wawancaranya:

“...Pembentukan satgas ini awalnya dibentuk oleh LHKP, pak Asad sebagai ketua LHKP ingin ada sebuah gerakan anak muda di lingkungan Muhammadiyah, pada saat itu pak Asad membentuk Satgas Muda Anti Korupsi, yang di dalamnya adalah teman-teman Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM), yang masuk dalam struktural maupun tidak struktural, dari itu pertama kali yang dilakukan adalah pelatihan ideologi, politik dan motivator (IDEOPOLITOR) kemudian di bentuk kepengurusan dan lain-lain, setelah berjalan lalu di deklarasikan di titik nol, ada IPM, IMM jasman, IMM AR, PM, IPM, MPK, Peoneer Satgas Muda, dan juga Pemuda Muhammadiyah dan lain-lain, dari situ ada semacam pendidikan anti korupsi yang diadakan di Kaliurang, mengundang dari berbagai ortom-ortom muhammadiyah di Kota Yogyakarta, kemudian silih bergantinya waktu banyak kegiatan-kegiatan satgas, pak Afnan yang kemudian menjadi senator dan pembimbing kita, ada beberapa divisi terbentuk didalam satgas muda ini, salah satunya adalah

dewan pakarnya adalah mas Mukhlis putra bapak Busyro Muqodas dia adalah sebagai dewan pakar, dan mbak Hanifah sebagai ketua PDNA, struktur lainnya dari AMM...” (Wawancara, 21 Januari 2016).

Satgas Muda Anti Korupsi merupakan gerakan yang terbentuk karena adanya keresahan para generasi muda Muhammadiyah terhadap permasalahan korupsi yang sekarang dialami oleh bangsa ini. Berangkat dari keresahan tersebut, maka Satgas Muda Anti Korupsi melakukan gerakan yang terfokus pada kegiatan pencegahan korupsi, melalui pendidikan antikorupsi, sosialisai antikorupsi, dan pengawasan terhadap pemerintah. Semenjak berdiri dan di deklarasikan Satgas Muda Anti Korupsi terus konsen melaksanakan kegiatan-kegiatan bertema anti korupsi di wilayah Kota Yogyakarta. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Satgas Muda Anti Korupsi memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan dan kecerdasan kepada masyarakat Kota Yogyakarta, sehingga muncul kepekaan sosial masyarakat terhadap masalah korupsi dan diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pencegahan korupsi di Kota Yogyakarta. Pembentukan Satgas Muda Anti Korupsi awalnya dilakukan dengan cara memberikan pendidikan kader pada Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) tentang ideologi politik dan motivator (IDEOPOLITOR) yang dilaksanakan pada tanggal 26-28 Mei 2013. Salah satu rekomendasi yang dikeluarkan dalam pendidikan IDEOPOLITOR tersebut adalah dibentuknya Satgas Muda Anti Korupsi di wilayah Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta, seperti yang telah disampaikan oleh Ashad Kusuma Djaya ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) yang menjadi penggagas

terbentuknya Satgas Muda Anti Korupsi dan juga sebagai pembina organisasi ini dalam wawancara dengan peneliti, berikut kutipan wawancaranya:

“...Pertama terbentuknya Satgas Muda Anti Korupsi ini boleh dikatakan dimulai dengan diadakannya training IDEOPOLITOR tanggal 26-28 Mei 2013, kemudian dibentuklah Satgas Muda Anti Korupsi ini dan di deklarasikan pada tanggal 1 maret 2014, salah satu rekomendasi dari acara training IDEOPOLITOR ini adalah salah satunya membentuk Satgas Muda Anti Korupsi, nah baru kemudian proses dari pembentukan sampai deklarasi agak lama karena proses pematangan dalam kebutuhan organisasi, sosialisasi ke cabang-cabang kemudian baru tanggal 1 maret 2014 dideklarasikan Satgas Muda Anti Korupsi di titik nol Kota Yogyakarta...” (Wawancara, 24 Januari 2016).

Pembentukan Satgas Muda Anti Korupsi oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta ini juga dikatakan oleh Ashad Kusuma Djaya sebagai bentuk konsistensi Muhammadiyah yang harus memberikan sebuah Islam yang kongkrit, yaitu Islam yang mampu menjawab permasalahan masyarakat, bangsa dan negara, salah satunya adalah permasalahan korupsi, berikut kutipan wawancaranya:

“...hal yang mendasar dalam pendirian Satgas Muda Anti Korupsi ini adalah sebuah konsistensi Muhammadiyah yang harus selalu mampu memberikan suatu Islam yang bersifat kongkrit, bukan hanya bersifat normatif, tapi Muhammadiyah harus mampu memberikan sebuah jawaban-jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat bangsa dan negara ini. nah salah satu yang kita anggap serius yang sedang dihadapi oleh bangsa ini

adalah persoalan korupsi, kemudian secara berkelanjutan pada Muhammadiyah ini yang bersifat internal, kami menyadari perlu adanya proses suatu pengkaderan yang bersifat baru, salah satunya adalah kader anti korupsi itu, pemuda perlu terlibat dalam masalah korupsi itu. Ini adalah sebuah bentuk konsistensi Muhammadiyah dalam menyalurkan para angkatan mudanya dalam sumbangsih kepada bangsa dan negara yang terkhusus dalam permasalahan korupsi...” (Wawancara, 24 Januari 2016).

Pada dasarnya memang diakui atau tidak diakui permasalahan korupsi di Indonesia pada umumnya telah menjadi persoalan yang begitu serius. Penanganan kasus-kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berjalan dan banyak menyeret nama-nama pejabat yang tersohor dalam negeri ini, tetapi nyatanya itu tidak membuat jera para pelaku koruptor untuk melakukan tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam proses pemberantasan korupsi perlu ada cara lain selain yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah. Semua elemen masyarakat khususnya para pemuda sudah selayaknya ikut andil dalam mengatasi permasalahan korupsi yang dimulai dari wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Proses pencegahan melalui jihad anti korupsi yang dilakukan oleh Satgas Muda Anti Korupsi menjadi bukti bahwa pemuda juga mampu untuk menjadi pelopor anti korupsi. Walaupun dampak dari adanya proses pencegahan ini adalah jangka panjang, akan tetapi proses ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam upaya mengatasi permasalahan korupsi. Ada sebuah *quote* yang muncul dalam buletin bulanan Satgas Muda Anti Korupsi yang ditulis Djaya (2016), “Korupsi telah menzalimi mayoritas masyarakat,

karena orang-orang yang beriman merasa terpanggil oleh seruan dalam ayat ke 75 Al- Qur'an Surah An- Nisaa'. Masalahnya sekarang orang berimankah kita ini?"

Pernyataan tersebut adalah sebuah pernyataan yang sedikit menggelitik, apalagi disebutkan kalau orang beriman sudah sepantasnya ikut dalam jihad anti korupsi, tidak boleh diam dengan permasalahan korupsi dan wajib untuk melawannya, seperti slogan Satgas Muda Anti Korupsi yang selalu didengungkan dalam setiap kegiatan, kaos, stiker, dan lain sebagainya yang peneliti temukan adalah kata "Korupsi Itu Dilawan Bukan Didiamkan". Slogan tersebut yang dijadikan Satgas Muda Anti Korupsi sebagai penyemangat untuk melakukan gerakan *jihad* anti korupsi.

Melengkapi sejarah singkat tersebut di atas, selanjutnya akan digambarkan tentang kegiatan awal yang dilakukan oleh Satgas Muda Anti Korupsi dalam membentuk organisasi gerakan anti korupsi, kegiatan awal tersebut sebagai berikut.

Pertama, lokakarya. Kegiatan awal yang dilakukan oleh Satgas Muda Anti Korupsi, setelah adanya kegiatan *training* Ideologi, Politik, dan Motivator (IDEOPOLITOR), adalah mengadakan lokakarya. Kegiatan lokakarya ini merupakan langkah yang dilakukan untuk memenuhi amanah yang diberikan dalam pendidikan Ideopolitor. Kegiatan lokakarya ini telah merumuskan tentang bagaimana bentuk perjuangan Satgas Muda Anti Korupsi dalam melakukan pencegahan korupsi di Kota Yogyakarta. Beberapa agenda pada kegiatan lokakarya adalah membentuk beberapa program kerja terkait pendidikan anti korupsi, sosialisasi anti korupsi, dan pengawasan kepada pemerintah. Selain itu dalam kegiatan lokakarya juga

membentuk kepengurusan, pedoman dasar, dan divisi-divisi yang akan bekerja dalam upaya pencegahan korupsi. Kegiatan lokakarya tersebut melahirkan beberapa divisi yaitu (1). Pengawasan Pembangunan. (2). Pendidikan Masyarakat. (3). Konsolidasi Organisasi. (4). Media Komunikasi dan Festival, seperti apa yang telah disampaikan oleh saudara Muhammad Aminulloh selaku bendahara Satgas Muda Anti Korupsi, berikut kutipan wawancaranya:

"...Setelah itu ada lokakarya, dalam lokakarya itu satgas membentuk komisi yang melahirkan program-program yang dilaksanakan oleh 4 (empat) divisi, yang pertama itu divisi pengawasan pembangunan, terus pendidikan masyarakat, terus konsolidasi organisasi dan yang terakhir itu divisi media komunikasi dan festival, ke 4 (empat) divisi itu yang akan menjalankan program kerja, dan setiap divisi ada koordinatornya bertanggungjawab kepada ketua satgas dan anggota divisinya..." (Wawancara, 19 Januari 2016).

Pernyataan di atas menunjukkan bagaimana Satgas Muda Anti Korupsi cukup serius dalam membentuk sebuah organisasi. Satgas Muda Anti Korupsi ingin benar-benar ikut secara maksimal dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini terlihat dari ke 4 (empat) divisi yang dibentuk terfokus kepada penanaman sikap anti korupsi kepada masyarakat dan pengawasan kepada pemerintah Kota Yogyakarta.

Kedua, deklarasi. Deklarasi Satgas Muda Anti Korupsi merupakan kegiatan kedua yang dilakukan oleh Satgas Muda Anti Korupsi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dikenalkannya Satgas Muda Anti Korupsi kepada seluruh elemen masyarakat Kota Yogyakarta. Kegiatan tersebut dilaksanakan di titik nol Kilometer

(KM.0) Kota Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 2014. Seperti yang telah disampaikan oleh Fatma Wulandari Wakil Ketua Satgas Muda Anti Korupsi dalam wawancara dengan peneliti, berikut kutipan wawancaranya.

“...Pada saat itu deklarasi Satgas Muda Anti Korupsi merupakan tanda awal terbentuknya Satgas Muda Anti Korupsi di Kota Yogyakarta, ini suatu pernyataan sikap dari bentuk keresahan tentang korupsi, dan keinginan untuk ikut dalam mengatasi permasalahan korupsi diutarakan dalam deklarasi itu, ada yang berorasi, ada yang pegang spanduk bertuliskan hal-hal tentang korupsi, ada yang membagikan stiker dan macam-macam lainnya. Memang pembentukan organisasi prosesnya lama sejak tahun 2013 dengan berbagaimacam pemenuhan yang harus dilakukan dan baru pada tahun 2014 itu dikenalkan Satgas Muda Anti Korupsi kepada masyarakat, ada pak Ashad, mas Noviar yang menjadi deklarator pada saat itu, yang terpenting kegiatan ini merupakan wujud dari keinginan satgas untuk ikut dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yang dimulai dari Kota Yogyakarta...” (Wawancara, 19 Januari 2016).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dideskripsikan bahwa kegiatan deklarasi ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Satgas Muda Anti Korupsi untuk menjadi tanda awal Satgas Muda Anti Korupsi dalam ikut mencarikan solusi terhadap permasalahan korupsi di Indonesia khususnya Kota Yogyakarta. Memang dalam sebuah organisasi seperti Satgas Muda Anti Korupsi yang berbentuk gerakan perlu diadakannya sebuah deklarasi, supaya masyarakat tahu akan adanya organisasi tersebut. Hal tersebut dilakukan supaya masyarakat mengerti tujuan dari Satgas Muda Anti Korupsi, kemudian harapan ke depan masyarakat umum akan ikut

terinspirasi oleh Satgas Muda Anti Korupsi dan pada akhirnya ikut dan berperan aktif dalam gerakan anti korupsi.

Ketiga, keorganisasian. Satgas Muda Anti Korupsi dalam gerakannya berpegang teguh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Muhammadiyah, karena keberadaan Satgas Muda Anti Korupsi merupakan gabungan dari beberapa Organisasi Otonom (Ortom) Muhammadiyah. Selanjutnya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, Satgas Muda Anti Korupsi memiliki landasan berfikir yang berbentuk pedoman dasar yang selalu menjadi pegangan. Terdapat 3 (tiga) pedoman dasar Satgas Muda Anti Korupsi seperti yang disampaikan dalam *website* Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta (2014), yaitu (1). Mendorong pemberantasan korupsi di Kota Yogyakarta bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan berbagai elemen masyarakat lainnya. (2). Melakukan pendidikan anti korupsi bagi segenap warga Muhammadiyah dan masyarakat pada umumnya di Kota Yogyakarta untuk peka terhadap persoalan-persoalan korupsi di sekitar mereka. (3). Membantu sebisa-bisanya agar warga masyarakat yang kurang mampu bisa mendapatkan haknya melalui pengawasan kebijakan dan program Pemerintah Kota Yogyakarta, serta tindakan lain yang bertujuan untuk menjamin berbagai kebijakan dan program tersebut tidak salah sasaran.

Satgas Muda Anti Korupsi juga memiliki lambang yang dijadikan sebagai salah satu bentuk dari identitas dan juga pemenuhan sebagai organisasi yang legal di bawah Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta. Adapun lambang dari Satgas Muda Anti Korupsi adalah sebagai berikut (lihat gambar 1).

Gambar 1
Lambang Satgas Muda Anti Korupsi



Sumber: Dokumentasi Satgas Muda Anti Korupsi

Penjelasan dari pengertian lambang Satgas Muda Anti Korupsi merujuk pada wawancara 21 Januari 2016 dengan Arif Muhammad ketua Satgas Muda Anti Korupsi, yang dapat disimpulkan (1). Dominasi warna merah putih sebagai simbol kebangsaan kita Indonesia, (2). Logo Pergerakan Muhammadiyah sebagai simbol awal mula lahirnya Satgas Muda Anti Korupsi yaitu di organisasi Muhammadiyah, (3). Tulisan Satgas Muda Anti Korupsi dalam 2 (dua) pita sebagai simbol nama gerakan, (4). Tulisan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta sebagai simbol bahwa Satgas Muda Anti Korupsi dibentuk oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta dan berlandung dan bertanggung jawab kepadanya.

Pemuda pada Satgas Muda Anti Korupsi merupakan pemuda yang memiliki umur antara 16 sampai 30 tahun. Pemuda tersebut

merupakan kader dari beberapa organisasi otonom Muhammadiyah yang tergabung dalam Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM). Pemuda pada Satgas Muda Anti Korupsi terdiri dari pengurus, anggota, dan juga relawan dalam melakukan jihad anti korupsi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Arif Muhammad dalam wawancara dengan peneliti, berikut kutipan wawancaranya

“...Teman-teman itu ya para pemuda yang ada di AMM itu mas, jumlahnya 30 ditambah teman-teman relawan, ya kira-kira beserta relawan hampir 40 mas, itu semua pemuda yang umurnya kalau ditanya apakah sesuai dengan Undang-Undang Kepemudaan ya iya, karena semua kan tergabung dalam AMM, rata-rata umurnya 18 sampai 25 tahunan...”
(Wawancara, 11 Mei 2016)

Beberapa pemuda dalam Satgas Muda Anti Korupsi yang terdiri dari gabungan Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) tersebut di atas secara bersama-sama melakukan sinergi untuk melaksanakan jihad anti korupsi dalam upaya pencegahan korupsi. Satgas Muda Anti Korupsi dalam melaksanakan gerakan anti korupsi juga bekerjasama dengan beberapa organisasi kepemudaan yang lain di luar Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM), sebagai contoh seperti Gusdurian dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan sinergi antar organisasi kepemudaan dalam upaya pencegahan korupsi, sehingga proses dari gerakan tersebut bisa maksimal. Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Aminulloh dalam wawancara dengan peneliti, berikut kutipan wawancaranya:

“Dulu pernah ada salah satu acara dengan organisasi kepemudaan lain ada

teman-teman Gusdurian, dan organisasi kepemudaan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta ini, itu dalam kegiatan menentukan road map langkah pencegahan korupsi di wilayah Kota Yogyakarta supaya gerakannya lebih baik dan tepat sasaran...” (Wawancara, 19 Januari 2016).

Pernyataan tersebut di atas dapat dideskripsikan bahwa dalam melakukan gerakan jihad anti korupsi Satgas Muda Anti Korupsi juga bekerjasama dengan beberapa organisasi kepemudaan yang lain yang berada di wilayah Kota Yogyakarta. Kerjasama tersebut bertujuan untuk dapat saling bertukar pengalaman, informasi, dan menentukan *road map* gerakan pencegahan korupsi di Kota Yogyakarta, sehingga gerakan yang dilakukan bisa dilaksanakan dengan baik.

Peran Pemuda Dalam Upaya Pencegahan Korupsi

Beberapa peran yang dilakukan oleh Satgas Muda Anti Korupsi dalam upaya pencegahan korupsi di Kota Yogyakarta berbentuk kegiatan. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Satgas Muda Anti Korupsi menurut pengamatan peneliti memiliki sifat berkelanjutan. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya bersifat sementara ketika ada kasus korupsi saja, melainkan kegiatan yang dilakukan berkelanjutan dan tidak terpaku dalam kondisi apapun. Kegiatan pertama yang dilakukan oleh Satgas Muda Anti Korupsi, yaitu melaksanakan pendidikan anti korupsi yang meliputi hal-hal sebagai berikut.

Pertama, pembangunan perilaku anti korupsi kepada internal Satgas Muda Anti Korupsi melalui kegiatan pelatihan jihad anti korupsi dan pelatihan membaca anggaran. Kedua kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk membekali anggota dan calon anggota Satgas

Muda Anti Korupsi pengetahuan permasalahan korupsi yang ada di Indonesia. Dengan kegiatan tersebut diharapkan anggota Satgas Muda Anti Korupsi memiliki pemahaman yang luas terkait permasalahan-permasalahan korupsi yang ada di Kota Yogyakarta secara khusus dan Indonesia secara umum. Sehingga anggota Satgas Muda Anti Korupsi memiliki bekal yang kuat dalam melakukan gerakan anti korupsi.

Kedua, pembangunan perilaku anti korupsi kepada masyarakat umum Kota Yogyakarta melalui kegiatan forum *muroqobah*, pendidikan anti korupsi berbasis kampung, dan *jagongan* pelajar anti korupsi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang berdasar pada nilai Pancasila, nilai dan prinsip anti korupsi, serta nilai-nilai yang ada dalam agama. Selain itu kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Kota Yogyakarta mengenai permasalahan korupsi. Harapannya adalah masyarakat memiliki kepekaan terhadap kejadian korupsi yang terjadi dilingkungannya, sehingga terwujudnya gerakan masyarakat anti korupsi.

Kegiatan tersebut pada dasarnya merupakan sosialisasi anti korupsi yang dilakukan oleh Satgas Muda Anti Korupsi. Melalui forum-forum tersebut dimaksudkan untuk mengajak masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta untuk mendiskusikan kasus-kasus *update* tentang permasalahan korupsi yang ada di wilayah Kota Yogyakarta secara khusus dan Indonesia secara umum. Harapan dari kegiatan ini adalah mencari jalan keluar tentang gerakan yang akan dilakukan dalam mengatasi permasalahan korupsi yang sedang terjadi. Sosialisasi anti korupsi juga dilakukan melalui media buletin SATDATIKOR, penyebaran stiker anti korupsi pada acara *car free day*,

sosialisasi nilai anti korupsi melalui media sosial, dan sosialisasi wacana anti korupsi melalui pojok anti korupsi. Keempat kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat Kota Yogyakarta mengenai permasalahan dan gerakan anti korupsi yang dilakukan oleh Satgas Muda Anti Korupsi sehingga harapannya adalah adanya partisipasi masyarakat secara luas dalam melakukan gerakan anti korupsi.

Ketiga, pengawasan kepada pemerintah meliputi kegiatan menganalisis Raperda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) dan kegiatan aksi Yogja Gumregah tolak revisi undang-undang KPK. Kedua kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk melaksanakan pengawasan kepada pemerintah, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan nilai dan prinsip anti korupsi. Sebagai contoh kajian RIPPDA dilakukan karena adanya kebijakan pariwisata di Kota Yogyakarta yang dianggap tidak sesuai dengan nilai dan prinsip anti korupsi. Padahal pariwisata merupakan salah satu hal yang menyangkut hidup orang banyak mengingat Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata. Kegiatan Yogja *gumregah* tolak revisi undang-undang KPK merupakan bentuk konsistensi Satgas Muda Anti Korupsi dalam proses pemberantasan korupsi. Ketika ada upaya pelemahan KPK maka Satgas Muda Anti Korupsi memiliki kewajiban untuk melakukan dukungan terhadap lembaga negara yang mengurus permasalahan korupsi tersebut.

Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah Kriteria Ketahanan Wilayah

Berangkat dari landasan teori penelitian ini bahwa ketahanan wilayah merupakan bentuk mikro dari ketahanan nasional, dimana setiap dimensi ketahanan wilayah akan

berdampak pada ketahanan nasional. Pada era Otonomi Daerah konsep ketahanan nasional harus dibangun dari wilayah-wilayah yang ada di seluruh Indonesia, artinya ketika setiap daerah di Indonesia memiliki ketahanan wilayah yang tangguh, maka secara otomatis ketangguhan ketahanan nasional dapat terwujud.

Mewujudkan ketahanan wilayah yang tangguh diperlukan suatu pembinaan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Hal tersebut harus dilakukan oleh seluruh komponen yang ada di suatu wilayah, baik pemerintah, organisasi kemasyarakatan maupun masyarakat umum. Sudah tidak selayaknya dalam upaya pencapaian ketahanan wilayah hanya dibebankan kepada pemerintah daerah saja. Peran serta masyarakat khususnya pemuda secara langsung juga sangat diperlukan untuk mengoptimalkan proses perwujudan ketahanan wilayah. partisipasi pemuda dalam bela negara menghasilkan pemahaman, kesadaran, dan komitmen terhadap bela negara. Dari pemahaman, kesadaran, dan komitmen terhadap bela negara tersebut kemudian memberikan pengaruh terhadap ketahanan wilayah (Febrihananto, dkk 2017). Ketahanan wilayah merupakan bentuk suatu stabilitas yang bisa tercapai jika setiap elemen baik pemerintah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan bisa berjalan secara berdampingan, saling mendukung dan mengawasi satu sama lain. Kondisi tersebut yang nantinya akan menghasilkan suatu kekuatan yang luar biasa untuk meningkatkan kemampuan wilayah dalam mewujudkan ketahanan wilayah, sehingga suatu wilayah mampu untuk mewujudkan kesejahteraan, keseimbangan, serta keserasian dalam setiap sendi kehidupan yang sesuai dengan amanah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Peran yang dilakukan Satgas Muda Anti Korupsi merupakan salah satu langkah untuk mendukung terwujudnya ketahanan wilayah di Kota Yogyakarta. Permasalahan korupsi merupakan salah satu penyakit negeri ini yang dapat mengganggu eksistensi ketahanan wilayah, maka dari itu proses pencegahan korupsi harus terus dilakukan untuk menciptakan kepekaan masyarakat terhadap permasalahan korupsi. Meskipun apa yang dilakukan oleh Satgas Muda Anti Korupsi memiliki efek jangka panjang, namun dari situ timbul harapan terwujudnya Kota Yogyakarta yang bersih dari korupsi dan ketahanan wilayah yang tangguh dapat tercapai dengan baik.

Implikasi ketahanan wilayah Kota Yogyakarta dalam penelitian ini menggunakan landasan yang ada pada asta gatra. Implikasi ketahanan wilayah Kota Yogyakarta dari peran Satgas Muda Anti Korupsi dalam upaya pencegahan korupsi secara langsung berpengaruh terhadap panca gatra (gatra sosial), sedangkan pada tri gatra (gatra alamiah) tidak memiliki pengaruh secara langsung, meski begitu secara tidak langsung tetap akan memiliki pengaruh, mengingat efek yang ditimbulkan dari korupsi sangat luas.

Pemaparan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketahanan wilayah Kota Yogyakarta dapat terwujud apabila setiap aspek kehidupan yang ada dalam asta gatra khususnya panca gatra (gatra sosial) berjalan dengan baik. Beberapa aspek dalam gatra sosial adalah aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek keamanan.

Kelima aspek tersebut di atas harus berjalan secara baik dalam mewujudkan ketahanan wilayah, maka proses perjalanannya seluruh elemen Kota Yogyakarta harus

berdampingan dan bekerjasama untuk mewujudkan hal tersebut. Memang untuk mewujudkan harapan itu tidaklah mudah, akan tetapi perjuangan untuk mewujudkan ketahanan wilayah Kota Yogyakarta melalui 5 (lima) aspek tersebut harus terus dilakukan dengan optimisme yang tinggi. Alasannya adalah supaya aspek-aspek yang berpengaruh dalam menjaga ketahanan wilayah tetap berjalan dengan baik, sehingga ketika ketahanan wilayah bisa terwujud, pada akhirnya akan mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh.

Salah satu yang harus diberi perhatian serius dalam perwujudan ketahanan wilayah adalah permasalahan korupsi, karena seperti yang sudah dibahas pada latar belakang penelitian ini bahwa permasalahan korupsi memberikan dampak buruk bagi pembangunan bangsa. Apalagi semenjak adanya era otonomi daerah permasalahan korupsi semakin merajalela dan menyebar di seluruh wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan terganggunya pembangunan bangsa yang meliputi aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek keamanan, sehingga ketahanan wilayah tidak bisa terwujud dengan baik.

Implikasi kepada ketahanan wilayah dari peran yang dilakukan oleh Satgas Muda Anti Korupsi dalam melakukan pencegahan korupsi di Kota Yogyakarta dapat dilihat dari menguatnya aspek asta gatra ketahanan wilayah khususnya terhadap gatra sosial yang memiliki implikasi secara langsung.

Aspek Ideologi

Implikasi terhadap aspek ideologi dari peran yang dilakukan oleh Satgas Muda Anti Korupsi adalah upaya membentuk sikap anti korupsi yang dilakukan melalui kegiatan

pendidikan anti korupsi dan sosialisasi anti korupsi. Pada pelaksanaannya Satgas Muda Anti Korupsi memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai anti korupsi yang ada dalam lingkungan masyarakat. Mulai dari nilai Pancasila, nilai agama, serta nilai adat istiadat.

Penanaman nilai Pancasila dan nilai agama yang dilakukan oleh Satgas Muda Anti Korupsi adalah melalui forum *muroqobah*, karena forum tersebut memiliki tujuan untuk menciptakan manusia yang sadar akan keberadaan Tuhan yang maha mengetahui segalanya. Artinya, semua yang dilakukan oleh manusia diawasi dan nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Hal tersebut sesuai dengan nilai yang ada pada Pancasila tentang keyakinan bahwa keberadaan Tuhan dan juga sesuai nilai agama yang meyakini bahwa Tuhan selalu mengawasi akan semua apa yang dilakukan oleh setiap manusia. Apabila nilai tersebut tertanam secara baik dalam setiap diri manusia, maka harapannya ke depan adalah setiap manusia sadar bahwa perbuatan korupsi adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai Pancasila, adat istiadat serta agama.

Implikasi peran Satgas Muda Anti Korupsi terhadap aspek ideologi ini juga terlihat dari kegiatan *jagongan* pelajar anti korupsi. Pada *jagongan* pelajar anti korupsi Satgas Muda Anti Korupsi datang ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kota Yogyakarta untuk memberikan nilai-nilai Pancasila, nilai dan prinsip anti korupsi, serta nilai-nilai kebudayaan yang ada di wilayah Keraton Yogyakarta. Dari kegiatan ini harapannya adalah para pelajar yang ada di wilayah Kota Yogyakarta memiliki sikap anti korupsi yang kuat dan memegang teguh ideologi dan nilai-nilai tersebut di atas.

Aspek Politik

Peran yang dilakukan oleh Satgas Muda Anti Korupsi merupakan salah satu alternatif pemberantasan korupsi untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam gerakan anti korupsi. Kegiatan pendidikan anti korupsi, sosialisasi anti korupsi, dan pengawasan terhadap pemerintahan yang dilakukan oleh Satgas Muda Anti Korupsi memiliki tujuan untuk membuat semua elemen yang ada di Kota Yogyakarta peka terhadap permasalahan korupsi. Beberapa kegiatan yang dilakukan seperti *jagongan* anti korupsi, panji aksi, pendidikan anti korupsi berbasis kampung dan keluarga, pelatihan membaca anggaran dan lain sebagainya merupakan bentuk penyadaran kepada elemen masyarakat tentang pentingnya pengetahuan permasalahan korupsi.

Implikasi dari peran Satgas Muda Anti Korupsi terhadap aspek politik yang nampak adalah Kota Yogyakarta mulai dilihat sebagai salah satu kota yang memiliki proses perpolitikan yang bersih dari korupsi. Persepsi masyarakat terkait perpolitikan di Kota Yogyakarta juga memiliki nilai cukup tinggi, sehingga proses perpolitikan bisa diawasi secara bersama untuk meminimalisir permasalahan korupsi. Sebagai contoh pada tahun 2014 Kota Yogyakarta dipilih oleh KPK untuk dijadikan tempat festival anti korupsi dalam memperingati hari anti korupsi seluruh dunia.

Pernyataan yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam *website* (2014) bahwa pemilihan Kota Yogyakarta sebagai tempat festival anti korupsi adalah dikarenakan Kota Yogyakarta sebagai salah satu kota yang memiliki tingkat korupsi kecil dan peran serta masyarakat untuk mengawal proses politik sudah terbangun dengan baik. Kota Yogyakarta pada tahun 2014

masuk dalam 10 (sepuluh) besar kota yang memiliki indeks integritas tertinggi tingkat daerah. Kota Yogyakarta juga mendapat nilai tertinggi pada survei persepsi masyarakat dalam proses politik, pemilihan umum, dan tata kelola pemerintahan Indonesia *Government Index* (IGI) tahun 2014. Beberapa prestasi tersebut membuat Kota Yogyakarta layak untuk dijadikan sebagai contoh proses pencegahan korupsi di Indonesia. Apalagi di Kota Yogyakarta banyak gerakan-gerakan anti korupsi dan juga ada proyek percontohan KPK yaitu pencegahan korupsi berbasis kampung dan keluarga. Salah satu yang terlibat dan ikut andil dalam kegiatan tersebut disitu Satgas Muda Anti Korupsi.

Pemaparan tersebut di atas menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Satgas Muda Anti Korupsi memiliki implikasi terhadap bidang politik. Walaupun Satgas Muda Anti Korupsi tidak menjadi satu-satunya faktor yang mempengaruhi aspek politik Kota Yogyakarta. Akan tetapi keterlibatan Satgas Muda Anti Korupsi pada penyelenggaraan pendidikan anti korupsi berbasis kampung dan keluarga serta beberapa gerakan yang lain menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Satgas Muda Anti Korupsi berimplikasi pada aspek politik ketahanan wilayah Kota Yogyakarta.

Aspek Ekonomi

Pada aspek ekonomi ini pemahaman awal yang harus dibangun adalah dampak yang diakibatkan dari korupsi begitu luas, tidak terkecuali pada aspek ekonomi. Aspek ekonomi merupakan hal yang bersentuhan secara langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 telah mengamanatkan bahwa “Perekonomian

disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”, kemudian ditegaskan kembali dalam ayat 3 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Amanat tersebut sudah cukup jelas untuk menggambarkan bagaimana sudah seharusnya tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Implikasi peran yang dilakukan oleh Satgas Muda Anti Korupsi dalam aspek ekonomi pada dasarnya tidak berdampak secara signifikan secara langsung. Hal ini dikarenakan apa yang dilakukan oleh Satgas Muda Anti korupsi memiliki dampak yang bersifat jangka panjang. Peran yang dilakukan oleh Satgas Muda Anti Korupsi belum menekankan tindakan nyata terhadap aspek ekonomi. Satgas Muda Anti Korupsi lebih menekankan pada upaya penanaman sikap anti korupsi kepada masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan oleh Satgas Muda Anti Korupsi baik pendidikan, sosialisasi, serta pengawasan kepada pemerintah memiliki tujuan munculnya gerakan masyarakat untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah Kota Yogyakarta supaya kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Misalnya kegiatan pelatihan membaca anggaran yang memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman bagaimana anggaran itu dibuat dan apakah anggaran tersebut sesuai dengan konsep kesejahteraan kepada rakyat.

Contoh lain adalah kegiatan mengenai pembahasan Draft Raperda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) yang juga merupakan bentuk dalam upaya menjaga aspek ekonomi berjalan dengan baik.

Mengingat Kota Yogyakarta yang merupakan jantung dari Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kota wisata yang akan memberikan dampak yang besar terhadap aspek ekonomi. Mulai dari pengusaha dengan skala besar seperti hotel, rumah makan, pusat oleh-oleh dan lain sebagainya sampai pengusaha kecil seperti pedagang kaki lima, tukang becak, andong dan lain sebagainya. Jadi pada aspek ekonomi ini peran yang dilakukan oleh Satgas Muda Anti Korupsi tidak memiliki dampak secara langsung akan tetapi memiliki dampak dalam jangka panjang.

Aspek Sosial Budaya

Ketika membahas mengenai aspek sosial budaya Kota Yogyakarta yang tidak boleh terlupakan adalah keberadaan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat serta Puro Pakualaman yang memiliki nilai-nilai luhur yang sudah tertanam sejak lama di dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Kota Yogyakarta. Nilai tersebut adalah nilai adat Jawa yang sangat kental dalam kehidupan sehari-hari dan berlangsung secara turun menurun. Kondisi tersebut oleh Satgas Muda Anti Korupsi dijadikan kekuatan yang ingin dimanfaatkan untuk memberikan nilai anti korupsi yang berasal dari nilai adat-istiadat Yogyakarta. Satgas Muda Anti Korupsi tengah membangun “Rumah Budaya Anti Korupsi” di Kota Yogyakarta sebagai wujud tindak lanjut dari pojok anti korupsi. Hal ini merupakan implikasi dalam membangun aspek sosial budaya yang tangguh. Selain melakukan pendidikan anti korupsi, sosialisasi anti korupsi, dan pengawasan terhadap pemerintahan.

Bukti dari implikasi dari peran yang dilakukan Satgas Muda Anti Korupsi pada tataran masyarakat yang berhubungan dengan

aspek sosial budaya adalah munculnya peran serta masyarakat yang memulai gerakan anti korupsi di lingkungan sekitarnya. Gambar 2 berikut menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai bergerak untuk membudayakan sikap anti korupsi di lingkungannya melalui plakat yang dipasang di kampungnya.

Gambar 2
Plakat Anti Korupsi di Kampung Notoprajan



Sumber : Dokumentasi Satgas Muda Anti Korupsi

Gambar 2 tersebut menggambarkan bahwa implikasi peran Satgas Muda Anti Korupsi dalam aspek sosial budaya sudah mulai terwujud, dimana gambar tersebut menunjukkan adanya peran masyarakat yang mulai sadar dengan permasalahan korupsi. Plakat yang bertuliskan nilai-nilai anti korupsi ini sangat penting dilakukan untuk mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak melakukan korupsi sekecil apapun. Harapannya tentu plakat tersebut juga akan ada di kampung-kampung lain di Kota Yogyakarta. Plakat ini juga tidak hanya sebagai simbol akan tetapi benar-benar dilakukan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat, sehingga tercipta budaya anti korupsi dalam sosial budaya masyarakat Kota Yogyakarta.

Aspek Keamanan

Dewasa ini pembangunan keamanan tidak lagi hanya terfokus kepada konflik perbatasan dan militer saja. Merujuk pada apa yang telah disampaikan oleh Darmono (2010), bahwa dinamika situasi global di era modern pasca perang dingin ternyata mengubah persepsi ancaman aspek keamanan. Ancaman yang semula hanya pengelolaan keamanan yang terfokus pada ancaman negara (*state centered security*) sekarang sudah bergeser kepada ancaman masyarakat (*people centered security*), dengan begitu dalam pembangunan keamanan yang perlu diperhatikan adalah memproteksi keamanan insani (*human security*). Bagaimana setiap individu masyarakat harus ditanamkan nilai yang baik yang mampu untuk melindungi dirinya dari pengaruh yang tidak baik.

Salah satu yang harus diperhatikan dalam membangun keamanan insani adalah gangguan dari permasalahan korupsi. Adanya berbagai macam masalah pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya seperti yang dipaparkan di atas puncaknya yang terjadi adalah gangguan terhadap aspek keamanan suatu wilayah dan keamanan nasional. Dirampoknya hak-hak yang seharusnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat menjadikan rakyat seakan putus asa dan bukan tidak mungkin konflik yang bersifat fisik, seperti kekerasan juga akan terjadi, maka dari itu permasalahan korupsi harus menjadi tanggungjawab bersama demi terwujudnya keamanan yang tangguh.

Bukti dari implikasi peran Satgas Muda Anti Korupsi terhadap aspek keamanan ini adalah upaya untuk ikut mendukung terwujudnya aspek tersebut dengan baik. Peran yang dilakukan dengan bentuk kegiatan pendidikan anti korupsi, sosialisasi anti korupsi

dan pengawasan terhadap pemerintahan merupakan bentuk dukungan yang nyata terhadap proses terwujudnya keamanan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berpandangan pada wawasan nusantara. Gerakan yang dilakukan oleh Satgas Muda Anti Korupsi ini bukanlah satu-satunya tolak ukur keberhasilan dalam perwujudan keamanan yang tangguh, tetapi niat mulia yang dilakukan oleh Satgas Muda Anti Korupsi harus dijadikan contoh oleh wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia untuk ikut bergerak dalam mengatasi permasalahan korupsi secara bersama, seperti yang disampaikan oleh Arif Muhammad dalam wawancara dengan peneliti, berikut kutipan wawancaranya

“...Ketika tidak ada permasalahan korupsi di Kota Yogyakarta itu kan menjadikan Kota Yogyakarta lebih aman secara politik, hukum, dan keamanan, jadi kontribusi teman-teman satgas itu adalah ketika kita melakukan terus pencegahan dan juga pengawasan itu adalah proses menuju nol korupsi di Kota Yogyakarta, meskipun banyak yang mengatakan mustahil akan tetapi semangat itu harus kita bakar terus untuk mewujudkan ketahanan wilayah. kalau semua program pemerintah bisa sampai di tangan rakyat, dan tidak ada kasus korupsi maka ketahanan wilayah akan terbangun...”
(Wawancara, 21 Januari 2016)

Pendapat lain disampaikan oleh Fathun Ni'am dalam wawancara dengan peneliti, berikut kutipan wawancaranya.

“...Keberadaan korupsi membuat orang saling curiga, misal pemerintah kepada rakyat, rakyat kepada pemerintah, bahkan rakyat dengan rakyat, itu yang menyebabkan konflik dan mengganggu keamanan kita, maka penanaman sikap anti korupsi diperlukan supaya semua memahami dan dapat saling mengawasi, kalau semua sudah

faham kan bisa saling mengawasi dan tidak menimbulkan saling curiga itu tadi, terus hidup serasi dan tidak terjadi konflik...” (Wawancara, 06 Februari 2016)

Pendapat lain yang menyangkut hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Busyro Muqodas pada acara Yogja Gumregah Tolak Revisi UU KPK, berikut pernyataannya.

“...Pelemahan pada KPK berarti pelemahan terhadap pemberantasan korupsi, pelemahan terhadap pemberantasan korupsi berarti melemahkan prinsip bernegara, akbitanya adalah pelemahan hukum, pelemahan HAM, pelemahan jaminan keamanan atau pelemahan yang lainnya...” (Catatan lapangan peneliti, 14 Februari 2016)

Cita-cita mulia yang dilakukan oleh Satgas Muda Anti Korupsi adalah bentuk dukungan terhadap perwujudan aspek keamanan yang tangguh. Semangat ingin mewujudkan sikap anti korupsi kepada seluruh masyarakat tentu bukan sesuatu yang utopis, karena keyakinan peneliti hal tersebut tidak akan sia-sia begitu saja, secara perlahan pasti akan memiliki dampak yang positif terhadap proses pemberantasan korupsi. Harapan ke depan adalah dengan adanya Satgas Muda Anti Korupsi ini dapat menginspirasi elemen masyarakat di wilayah-wilayah lain untuk melakukan gerakan yang sama, sehingga dukungan terhadap proses perwujudan keamanan bisa berjalan dengan baik, yang akhirnya tujuan dari hakikat aspek keamanan bisa terwujud.

SIMPULAN

Berdasar penjelasan tersebut di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

Pertama, Satgas Muda Anti Korupsi telah berperan dalam upaya pencegahan

korupsi di Kota Yogyakarta dengan berbagai macam cara. Peran yang dilakukan oleh Satgas Muda Anti Korupsi dengan bentuk kegiatan yang dibagi dalam 3 (tiga) hal yaitu pendidikan anti korupsi, sosialisasi anti korupsi, dan pengawasan kepada pemerintah.

Kedua, peran yang dilakukan oleh Satgas Muda Anti Korupsi memiliki implikasi kepada ketahanan wilayah Kota Yogyakarta yang meliputi aspek asta gatra khususnya gatra sosial yaitu aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek keamanan.

Selanjutnya, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, setiap anggota Satgas Muda Anti Korupsi harus terus konsisten dalam melakukan pencegahan korupsi dan mengatur jadwalnya supaya tidak berbarengan dengan organisasi yang diikuti lainnya.

Kedua, setiap pihak yang terkait dalam Satgas Muda Anti Korupsi untuk membantu anggota Satgas Muda Anti Korupsi dalam mengembangkan diri untuk memahami permasalahan korupsi melalui berbagai macam kegiatan dan pelatihan, sehingga meningkatkannya kualitas diri dan gerakan pencegahan korupsi yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Darmono, Bambang, 2010., Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia, *Jurnal Ketahanan Nasional*, hal 1-41 XV (1), April 2010

Evans, Kevin, 2009., Sistem Pencegahan Korupsi Pada Upaya Penanggulangan Bencana Alam, Dalam *Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Wijayanto, Ridwan Zachrie (Ed), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

- Febrihananto, E., Abdullah, I., & Zubaidi, A. (2017). Partisipasi Pemuda Purna Paskibraka Indonesia Dalam Kegiatan Bela Negara Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Tentang Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 68-85.
- Hadi, Kisno, 2010., Korupsi Birokrasi Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah, *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, Vol.7, No.1, 2010, hal. 51-70 ISSN 1829-8001
- Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt, 1993., *Sosiologi*, edisi kedelapan, terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh Aminuddin Ram dan Tita Sobari. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014., KPK Tegakkan Integritas dari Yogyakarta, (internet), <http://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2381-kpk-tegakkan-integritas-dari-yogyakarta>, (Diakses Tanggal 8 Mei 2016)
- Moleong, Lexy, J, 2006., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Pradiptyo. Rinawan, 2009., Korupsi di Indonesia, Perspektif Ilmu Ekonomi. Dalam *Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Ed. Wijayanto, Ridwan Zachrie (Ed). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Savitri, Irhana, E, 2014., Dampak Pengelolaan Sumber Daya Alam Migas Terhadap Pembangunan Daerah dan Implikasinya Pada Ketahanan Wilayah. *Tesis: Program Studi Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono, 2009., *Sosiologi*, CV. Jakarta: Rajawali
- Sunardi, R.M, 2004., *Pembinaan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia, Teori Ketahanan, Geostrategi Indonesia dan Ketahanan regional*, Jakarta: PT. Kuaternita Adidarma
- Suhardono,E, 1994., *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Thoha, Miftah, 2012., *Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia*, Yogyakarta, Thafa Media
- Wahyuni, Sari, 2012., *Qualitative Research Method*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Widiatmaka, P., Pramusinto, A., & Kodiran, K. (2016). Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Membangun Karakter Pemuda Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Pemuda (Studi Pada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(2), 180-198.
- Peraturan Perundangan**
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
- Wawancara**
1. Arif Muhammad
 2. Hanifah
 3. Ashad Kusuma Djaya
 4. Muhammad Aminullah
 5. Fatma Wulandari
 6. Fathun Ni'am